

**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 10      TAHUN 1978      SERI D      NO. 1**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**Nomor : 2 Tahun 1977**

**TENTANG**

**POLA DASAR RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN  
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

---

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNÜR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Menimbang : a.** Bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah diperlukan adanya Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah yang dalam garis besarnya berisikan tujuan, susunan prioritas dan strategi pembangunan ;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan pandangan-pandangan dan saran-saran dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Daerah yang menetapkan Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG POLA DASAR RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

#### **Pasal 1**

(1) Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ini disusun dalam rangka menunjang pelaksanaan REPELITA.

(2) Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang penuh dan menyeluruh, maka sistematika Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah disusun sebagai berikut :

**BAB I : Pendahuluan.**

- BAB II : Tujuan.  
BAB III : Susunan Prioritas.  
BAB IV : Strategi Pembangunan Daerah.  
BAB V : Penutup.

**Pasal 2**

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdapat dalam Naskah Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 3**

Program pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan serta usaha-usaha pembangunan akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

**Pasal 4**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 15 Pebruari 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH  
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
TINGKAT I JAWA TENGAH JAWA TENGAH  
KETUA,

**PARWOTO**

**SOEPARDJO**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 23 Desember 1977 No. Pem. 10/65/30-493.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 10 tanggal 18 Januari Tahun 1978 Seri D Nomor 1.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah,

**KARDIMAN**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**JAWA TENGAH**  
**Nomor : 2 Tahun 1977**  
**TENTANG**  
**POLA DASAR RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN**  
**DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**I. PENJELASAN UMUM.**

1. Dalam rangka peningkatan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah diperlukan adanya Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah yang merupakan rangkaian kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan Daerah di segala bidang yang berlangsung terus-menerus dan pertahapannya disesuaikan dengan REPELITA Nasional.

Dengan demikian maka Pola Dasar tersebut merupakan landasan kebijaksanaan untuk menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah.

2. Disamping itu Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ini disusun untuk menjamin agar pembangunan Daerah dapat berjalan dengan serasi dan dapat tercapai keselarasan antara pembangunan Daerah dan pembangunan Nasional.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) :

Sistematika Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah disusun berdasarkan bunyi pasal 3a. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 yaitu Pola Dasar

Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah dalam garis besarnya berisikan tujuan, susunan prioritas dan strategi pembangunan.

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah yang berisikan program-program sektoral yang terdapat di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan disusun dengan memperhatikan sumbangan pokok-pokok pikiran DPRD Tingkat I Jawa Tengah, yang didasarkan atas azas komplementer dan kontinuitas berpangkal tolak pada Pola Umum Pembangunan Nasional.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

---

# **POLA DASAR**

**RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN  
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

---

**DAFTAR ISI**

Halaman

<b>BAB I</b>	<b>:</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	
		B. Maksud dan tujuan .....	
		C. Landasan dan pokok-pokok penyusunan .....	
		D. Pelaksanaan .....	
<b>BAB II</b>	<b>:</b>	<b>TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH</b> .....	
<b>BAB III</b>	<b>:</b>	<b>SUSUNAN PRIORITAS</b> .....	
		A. Potensi Daerah .....	
		B. Masalah-masalah pokok Pembangunan Daerah .....	
		C. Sasaran Pokok Pembangunan Daerah .....	
		D. Susunan Prioritas Pembangunan Daerah .....	
<b>BABIV</b>	<b>:</b>	<b>STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH</b> .....	
		A. Strategi .....	
		B. Pendekatan .....	
		C. Arah dan kebijaksanaan Pembangunan Daerah .....	
		1. Bidang Ekonomi .....	
		2. Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya .....	
		3. Bidang Umum .....	
		D. Pembiayaan Pembangunan Daerah .....	
<b>BAB V</b>	<b>:</b>	<b>PENUTUP</b> .....	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Pengertian

Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan merupakan rangkaian kebijaksanaan pembangunan daerah Jawa Tengah disegala bidang yang berlangsung terus-menerus.

#### B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud ditetapkannya Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah ini ialah untuk memberikan :

- a. arah dan pedoman bagi rakyat dan masyarakat Jawa Tengah maupun bagi aparatur Pemerintah Daerah dan aparatur Pemerintah Pusat yang ada di daerah dalam melaksanakan pembangunan Daerah ;
- b. landasan dan garis-garis besar kebijaksanaan pembangunan daerah bagi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

dengan tujuan agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan oleh rakyat Jawa Tengah.

2. Rangkaian kebijaksanaan pembangunan daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa Tengah dalam rangka menunjang mewujudkan (pembangunan) Nasional seperti yang dimaksud didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

#### C. Landasan dan pokok-pokok penyusunan.

Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah ini disusun berdasarkan :

1. Landasan Idiil : Pancasila ;
2. Landasan Konstitusionil : Undang-Undang Dasar 1945 ;
3. Landasan Struktural :

- a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- b. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. Landasan Operasionil :

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, khususnya mengenai Pembangunan Daerah ialah :

- 1). "Untuk menjamin agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan serasi perlu diusahakan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional (daerah).

Oleh karena itu didalam Pelita kedua disamping usaha meningkatkan pembangunan sektor-sektor yang masing-masing berlangsung diberbagai daerah, harus pula ditingkatkan pembangunan daerah-daerah yang masing-masing mencakup berbagai sektor.

Dalam hubungan ini perlu dipahami kemampuan dan potensi masing-masing daerah serta masalah-masalah mendesak yang dihadapi, sehingga usaha-usaha pembangunan yang berlangsung dalam tiap-tiap daerah benar-benar sesuai dengan keadaan masing-masing daerah.

- 2): Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional harus juga diusahakan keserasian laju pertumbuhan antar daerah, yang antara lain dilakukan dengan memberi bantuan dan rangsangan untuk meningkatkan pembangunan kepada daerah-daerah yang relatif lebih terbelakang.
- 3). Untuk pelaksanaan peningkatan pembangunan daerah diperlukan peningkatan prakarsa dan partisipasi aktif. Dengan memperhatikan kemampuan Daerah maka perlu ditingkatkan pendapatan Daerah baik dengan pemungutan yang intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber yang ada maupun dengan penggalan sumber-sumber keuangan baru.

Dalam rangka ini harus diusahakan peningkatan kemampuan serta perbaikan aparatur Pemerintah Daerah.

- 4). Dalam melaksanakan pembangunan daerah harus tetap diperhatikan pembinaan Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi.

Dalam hubungan ini maka kebijaksanaan-kebijaksanaan mengenai pelaksanaan pembangunan daerah harus menunjang peningkatan pembinaan kesatuan ekonomi tersebut ;

- b. Tugas Pokok (Sapta Krida) Kabinet Pembangunan II ;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (REPELITA II) ;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 142 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### D. Pelaksanaan.

Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah ini dituangkan dalam Peraturan Daerah dan dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Pelaksanaan Pola Dasar ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah yang berisikan Rencana Induk Pengembangan beserta program-program sektoral dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah dituangkan dalam Rencana Tahunan dalam bentuk Peraturan Daerah, yang tercermin dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maupun dalam kebijaksanaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah lainnya.

Mengingat bahwa pelaksanaan Pembangunan Daerah merupakan pencerapan, penunjang dan pelengkap dari pelaksanaan Pembangunan Nasional, maka pelaksanaan Pola Dasar dan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada masa PELITA ke III disesuaikan dengan Pola Umum dan Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan dalam Repelita Nasional ke III yang akan datang

## BAB II

### TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

Tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah adalah :

1. Merunjang dan merupakan penerapan serta pelengkap dari pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia ;
2. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat melalui :
  - a. Pemecahan masalah-masalah pokok dan mendesak yang dihadapi oleh masyarakat Jawa Tengah dalam rangka usaha untuk lebih cepat mencapai tujuan pembangunan ;
  - b. Peningkatan dan pendaya gunaan potensi-potensi yang ada, yang berupa sumber daya baik alami maupun manusiawi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam ;
3. Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah, maka landasan serta azas-azas pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara menjadi landasan serta azas-azas pembangunan daerah.

## BAB III

### SUSUNAN PRIORITAS

#### A. Potensi Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah terletak diantara 108o 30' - 111o 30' Bujur Timur dan 6o 30' - 8o 30' Lintang Selatan, disebelah Utara dibatasi Laut Jawa, disebelah Timur berbatasan dengan Jawa Timur, disebelah Barat dengan Jawa Barat serta disebelah Selatan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samodera Indonesia. Luas Wilayah Jawa Tengah 34.503 km<sup>2</sup>, atau merupakan 25% nya luas Pulau Jawa.

Modal dasar dan faktor dominan yang merupakan potensi yang ada di Jawa Tengah meliputi :

#### 1. POTENSI MANUSIAWI

##### a. Penduduk dan angkatan kerja.

Menurut hasil Sensus Penduduk 1961 dan Sensus Penduduk 1971, penduduk Jawa Tengah berjumlah 18.407.471 orang pada tahun 1961 dan 21.865.263 orang pada tahun 1971. Dengan mempergunakan rumusan "exponential growth" (pertambahan dengan sistim bunga berbunga) besarnya tingkat pertumbuhan penduduk Jawa Tengah tiap tahun adalah 1,76%. Hasil Sensus Penduduk 1971 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Pulau Jawa merupakan 64,24% dari seluruh Indonesia dan jumlah penduduk Jawa Tengah lebih kurang sama dengan 28,8% dari jumlah penduduk Pulau Jawa.

Menurut hasil registrasi persiapan Pemilihan Umum 1977 penduduk Jawa Tengah berjumlah 23.424.142 orang dengan kepadatan 679 orang per km<sup>2</sup>. Hasil tersebut menunjukkan, bahwa 11,41% penduduk Jawa Tengah (2.672.695 orang) tinggal di daerah perkotaan dan 88,59% (20.751.447 orang) tinggal di daerah pedesaan.

Kepadatan penduduk disemua Kotamadya di Jawa Tengah adalah sangat tinggi, yaitu diatas 4000 orang per km<sup>2</sup> : yang terdapat di Kotamadya Surakarta dengan 8.784 orang per km<sup>2</sup>, disusul Kotamadya-Kotamadya Tegal, Pekalongan, Magelang, Semarang dan Salatiga. Adapun Kabupaten-Kabupaten yang kepadatan penduduknya cukup tinggi, yaitu diatas 1.000 orang per km<sup>2</sup> adalah Klaten,

Sukoharjo dan Tegal. Kepadatan penduduk terendah terdapat di Kabupaten Blora dengan 251 orang per km<sup>2</sup>.

Seperti diketahui, maka penghidupan angkatan kerja sebagian besar terletak pada sektor pertanian (57,9%). Adapun pertambahan angkatan kerja, ditaksir sebesar 350.000 orang per tahunnya.

**b. Modal Rokhaniah dan Mental.**

Modal rokhaniah dan mental, yaitu kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, merupakan tenaga penggerak yang tak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi-aspirasi masyarakat Jawa Tengah. Juga kepercayaan dan keyakinan masyarakat atas kebenaran falsafah Pancasila merupakan modal sikap mental yang dapat membawa masyarakat Jawa Tengah menuju cita-citanya.

**c. Modal Budaya**

Kebudayaan yang hidup dalam masyarakat Jawa Tengah yang telah berkembang sepanjang sejarah akan dapat memberikan arah pertumbuhan kebudayaan dalam pembangunan dan juga merupakan modal dasar bagi pengembangan kebudayaan Nasional di Jawa Tengah.

**2. POTENSI FISOGRAFIS**

**a. Topografi**

Dilihat dari segi relief, Jawa Tengah dapat dikatakan banyak ragamnya : pantai, dataran rendah, perbukitan/pegunungan yang landai hingga yang curam dan dataran tinggi.

Berdasarkan klasifikasi tingkat kemiringan/lereng, maka Jawa Tengah terbagi menjadi 4 kelas, sebagai berikut :

- 1). Kelas lereng 1 (0 - 2%) meliputi 41,3% dari luas Jawa Tengah ;
- 2). Kelas lereng 2 (2 - 15%) meliputi 27,7% ;
- 3). Kelas lereng 3 (15 - 40%) meliputi 21,2% ;
- 4). Kelas lereng 4 (lebih dari 40%) meliputi 9,8%.

Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan laut, Jawa Tengah dibagi menjadi 4 kelas ketinggian, yaitu :

- 1). Ketinggian 0 - 100 m, meliputi 53,3% dari luas area ;
- 2). Ketinggian 100 - 500 m, meliputi 27,4% ;
- 3). Ketinggian 500 - 1.000 m, meliputi 14,7% ;
- 4). Ketinggian lebih 1.000 m, meliputi 4,6%.

**b. Keadaan Iklim dan Permusiman.**

Jawa Tengah mempunyai iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau silih berganti disepanjang tahun. Temperatur rata-rata sebesar 27,40 C dengan kelembaban udara 80%. Menurut Schmidt dan Fergusson (Rainfall types based on wet and dry period ratios for Indonesia and Western New Guinea, verhandeligen No. 42, Djawatan Meteorologie dan Geofisik, Jakarta, 1952). Jawa Tengah terbagai atas 4 tipe curah hujan, yaitu :

- 1). Tipe A (1 bulan kering dan minimum 7 bulan basah) ;
- 2). Tipe B (1 s/d 2 bulan kering dan 3 s/d 10 bulan basah) ;
- 3). Tipe C (1 s/d 4 bulan kering dan 1 s/d 9 bulan basah) ;
- 4). tipe D (1 s/d 6 bulan kering dan 1 s/d 7 bulan basah).

**c. Jenis dan Penggunaan Tanah.**

Jenis-jenis tanah yang terdapat di Jawa Tengah ialah :

- 1). Tanah Alluvial, yaitu tanah yang beraneka sifatnya, berwarna kelabu, coklat atau hitam, produktivitasnya rendah sampai tinggi, dan biasa digunakan untuk tanah pertanian utama dan permukiman. Jenis tanah ini meliputi 29% dari seluruh luas tanah.
- 2). Tanah Latosol, yaitu tanah yang agak asam sampai asam, berwarna kuning, coklat atau merah, produktivitasnya sedang sampai tinggi, dan biasanya merupakan tanah pertanian yang sangat baik. Jenis ini meliputi 9% dari seluruh luas tanah.
- 3). Tanah Latosol dan Andosol, yaitu tanah yang merupakan campuran antara Latosol dan Andosol yang netral sampai asam, berwarna kelabu, coklat tua atau hitam, produktivitasnya sedang sampai tinggi, dan biasa digunakan untuk tanah pertanian sayur, perkebunan dan hutan. Jenis ini meliputi 14% dari seluruh luas tanah.
- 4). Tanah Litosol, yaitu tanah yang beraneka sifat dan warnanya, produktivitasnya rendah, dan biasanya merupakan tanah pertanian yang kurang baik atau padang rumput. Jenis ini meliputi 9% dari seluruh luas tanah.
- 5). Tanah Regosol (I dan II), yaitu tanah yang netral sampai asam, berwarna putih, coklat kekuning-kuningan coklat atau kelabu, produktivitasnya sedang sampai tinggi, dan biasa digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Jenis ini meliputi 20,5% dari seluruh luas tanah.

- 6). Tanah Grumosol (I dan II), yaitu tanah yang agak netral, berwarna kelabu sampai hitam, produktivitasnya rendah sampai sedang, dan biasa digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Jenis ini meliputi 13,5% dari seluruh luas tanah.
- 7). Tanah Mediteran Merah Kuning, yaitu tanah yang agak netral berwarna merah sampai coklat, produktivitasnya sedang sampai tinggi, dan biasa digunakan untuk sawah, tegal kebun buah dan padang rumput. Jenis ini meliputi 3% dari seluruh luas tanah.
- 8). Tanah Podsolik Merah Kuning, yaitu tanah asam yang berwarna kuning sampai merah, produktivitasnya rendah sampai sedang, dan biasa digunakan untuk pertanian dan perkebunan, disamping yang masih berupa hutan dan padang alang-alang. Jenis ini meliputi 2% dari seluruh luas tanah.

Berdasarkan penggunaannya maka tanah diperinci sebagai berikut : tanah sawah 30,33%, tanah tegalan 22,70%, tanah hutan 19,03%, tanah pekarangan 16,84%, tanah perkebunan 3,25%, tanah tambak 7,12% dan lain-lain 0,73%.

#### d. Bahan Tambang.

Di Jawa Tengah terdapat berbagai macam tambang yang tersebar di berbagai daerah. Untuk peningkatan eksploitasinya diperlukan penelitian dan inventarisasi yang seksama.

### 3. POTENSI HIDROLOGIS.

#### a. Sumber air di daratan.

Di Jawa Tengah terdapat berbagai macam sumber air yang dapat dipergunakan baik untuk tanaman maupun kehidupan pada umumnya.

Sumber-sumber air di daratan tersebut antara lain berupa :

#### 1). Sungai-sungai besar.

Sungai-sungai besar yang mengalir ke laut Jawa adalah :

Pemali, Rambut, Comal, Kuto, Bodri, Tuntang, Serang, Lusi dan Juana. Yang mengalir ke Samodra Indonesia adalah Citanduy, Serayu, Luk Ulo, Bogowonto, Progo dan Elo. Adapun Bengawan Solo merupakan sungai yang melintasi Jawa Tengah dan daerah Jawa Timur.

#### 2). Waduk-waduk besar.

Di Jawa Tengah terdapat 30 waduk besar yang terletak di daerah Purwodadi, Pati, Blora, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Klaten, Sukoharjo, Tegal dan Brebes.

**b. Kadaan Laut dan Pantai.**

Di sepanjang pantai Utara Jawa Tengah terbentang bagian Laut Jawa dan sepanjang pantai Selatan Jawa Tengah terletak Samodera Indonesia, baik yang mengandung potensi untuk sumber penghidupan yang luas berupa ikan dan hasil-hasil laut lainnya, maupun yang memberikan pengaruh yang sangat besar, terutama terhadap pola penghidupan di sepanjang pantai.

**4. POTENSI BIOTIS.**

**a. Kadaan Flora**

Potensi Fisiografis memungkinkan tumbuhnya aneka ragam flora, baik yang berupa tumbuh-tumbuhan alam, maupun tanaman-tanaman yang diusahakan antara lain : hutan lindung, hutan produksi, tanaman-tanaman perkebunan, pertanian dan pekarangan.

**b. Kadaan Fauna.**

Fauna di Jawa Tengah termasuk tipe Asia, terdiri dari : jenis-jenis yang sudah punah (misalnya gajah dan badak) dan jenis-jenis yang sampai sekarang masih diernakkan oleh penduduk seperti ternak lembu, kerbau, kuda, kambing, babi dan unggas, antara lain ayam dan itik, serta berbagai jenis ikan, binatang amfibia dan binatang melata.

**B. Masalah-Masalah Pokok Pembangunan Daerah.**

Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk mencapai peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat adalah perlu untuk menemukan dan memecahkan masalah-masalah pokok, yakni :

**1. Kependudukan.**

**a. Pertumbuhan Penduduk.**

Terdapat tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, yaitu sekitar 1,76% setahun, sebagai akibat dari pada tingginya tingkat kelahiran disatu pihak dan menurunnya tingkat kematian dilain pihak. Hal yang terakhir ini disebabkan karena usaha perbaikan kesehatan rakyat.

Terdapat struktur umur penduduk dengan golongan umur yang tidak produktif yang relatif tinggi, yaitu sekitar 49%.

**b. Distribusi Penduduk.**

Jumlah Penduduk Jawa Tengah besar, diantaranya sebanyak 88,59% tinggal di daerah pedesaan. Kepadatan penduduk umumnya

tinggi, yaitu di dalam daerah Kotamadya sekitar 4.383 - 8.784 orang per km<sup>2</sup> dan didalam daerah Kabupaten sekitar 251 - 1.472 orang per km<sup>2</sup>.

## 2. Keseimbangan Lingkungan dan Kelestarian Alam.

Terganggunya keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam yang mengancam kelangsungan sumber daya alami sebagai akibat dari pada kepadatan penduduk yang tinggi disatu pihak dan tingkat produksi masyarakat yang sebagian besar masih bersifat agraris di lain pihak menimbulkan tekanan penduduk disegala bidang dan kegiatan, terutama yang dihubungkan dengan penggunaan tanah. Imbangan antara jumlah tanah sawah, tegalan serta pekarangan disatu pihak dan jumlah penduduk dilain pihak (land-man ratio) sudah mencapai sekitar 0,10 ha/orang. Hal ini menyebabkan makin berkurangnya areal hutan dan makin meluasnya daerah-daerah kritis.

## 3. Pendapatan per kapita dan Distribusi Pendapatan.

Pendapatan per kapita di Jawa Tengah tahun 1969 dan 1973, yaitu tahun pertama dan tahun terakhir REPELITA I, apabila dihitung menurut harga konstan tahun 1969, adalah sebesar Rp. 17.319,10 dan Rp. 18.867,26, sedang apabila dihitung menurut harga yang berlaku sebesar Rp. 17.319,10 dan Rp. 31.319,65.

Distribusi pendapatan adalah tidak merata, yang diperkirakan tidak banyak menyimpang dari pola distribusi pendapatan Nasional, ialah bahwa : 40% jumlah penduduk menikmati 12% dari pendapatan Nasional, 40% jumlah penduduk berikutnya menikmati 35% dari pendapatan Nasional, 20% jumlah penduduk sisanya menikmati 53% dari pendapatan Nasional.

Kedadaan yang demikian itu tidak dapat membantu akumulasi modal melalui tabungan masyarakat dengan akibat sangat rendahnya investasi yang diperlukan bagi pengembangan industri, yang diharapkan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa, yang dapat mengimbangi kepadatan penduduk tersebut.

## 4. Prasarana.

### a. Prasarana Perhubungan.

Jalan-jalan yang terdapat di Jawa Tengah digolongkan dalam : jalan Negara, jalan Propinsi, jalan Kabupaten, jalan Kotamadya dan

jalan Desa. Keadaan jalan-jalan tersebut diatas masih belum dapat mengimbangi perkembangan arus lalu-lintas yang harus menampung beban angkutan jalan raya yang sangat tinggi dengan kecenderungan akan tetap meningkat pada tahun-tahun yang akan datang dengan rata-rata kenaikan yang tinggi. Hal yang sedemikian itu menyebabkan makin bertambahnya kerusakan-kerusakan pada jalan-jalan tersebut yang memerlukan biaya-biaya perbaikan.

Gambaran tentang keadaan jembatan-jembatan tidak jauh menyimpang dari keadaan-keadaan jalan sebagaimana ditukiskan diatas, walaupun dari segi pemeliharaannya tidak begitu banyak memerlukan biaya seperti halnya dengan jalan-jalan tersebut.

Keadaan perkereta-apian di Jawa Tengah menempatkan daerah Jawa Tengah dalam posisi yang beruntung, karena terdapatnya jaringan hubungan kereta api yang baik, tetapi belum dapat mengimbangi arus kebutuhan lalu-lintas, sehingga belum banyak dapat membantu meringankan fungsi beban angkutan jalan raya.

Prasarana Perhubungan Laut, misalnya pelabuhan Semarang sebagai pintu gerbang wilayah bagian Utara Jawa Tengah, terletak pada jalur lalu-lintas pelayaran yang tetap masih belum bebas dari pada gangguan angin Barat, yang menyebabkan pelabuhan tersebut pada bulan-bulan tertentu tidak dapat disinggahi kapal, sedangkan pengembangan pelabuhan Cilacap di wilayah bagian Selatan masih memerlukan waktu yang relatif cukup lama.

Walaupun prasarana Perhubungan Udara dengan adanya Pangkalan Udara A. YANI di Semarang dan PANASAN di Solo belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang memuaskan, masalah pengembangannya tidak merupakan masalah berat seperti halnya masalah perhubungan yang lain.

#### **b. Prasarana Produksi.**

Jawa Tengah yang memiliki bangunan-bangunan dan jaringan-jaringan pengairan (irigasi) yang baik dewasa ini menghadapi masalah rehabilitasi dan sistem pemeliharaan bangunan-bangunan serta jaringan-jaringan pengairan yang masih harus disempurnakan. Dengan bertambahnya bangunan-bangunan serta jaringan-jaringan yang baru, permasalahan sistem, pembiayaan serta eksploitasi bangunan-bangunan dan jaringan-jaringan tersebut bertambah kompleks.

Namun demikian masih terbuka kemungkinan perluasan bangunan-bangunan dan jaringan-jaringan yang cukup luas, yang perlu digarap melalui suatu studi Pola Induk Pengembangan Irigasi.

**c. Prasarana Listrik.**

Penyediaan prasarana listrik di Jawa Tengah masih belum memadai kebutuhan. Namun demikian sudah ada usaha peningkatan, baik melalui pembangunan pembangkit-pembangkit tenaga listrik yang baru, maupun dengan pembangunan jaringan inter-koneksi dengan Jawa Timur dan Jawa Barat.

**d. Prasarana Sosial Budaya**

Prasarana Sosial Budaya yang berupa bangunan-bangunan tempat latihan dan pendidikan, rumah sakit, pusat-pusat olahraga dan kesenian, tempat-tempat peribadatan dan sebagainya masih belum memadai, jika dibandingkan dengan pesatnya kenaikan kebutuhan penduduk. Dengan demikian prestasi pendidikan, kesehatan, olahraga serta ketrampilan belum memperlihatkan kemajuan yang berarti.

**5. Pengangguran dan Kesempatan Kerja.**

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pendapatan per kapita yang rendah menimbulkan rendahnya investasi oleh masyarakat dan sedikit sekali membuka lapangan kerja yang baru.

Tingkat produktivitas masyarakat yang sebagian besar bersifat agraris belum dapat menampung penambahan tenaga kerja yang makin meningkat. Hal ini menimbulkan sistem penampungan tenaga kerja dengan melibatkan sebanyak mungkin tenaga kerja dengan upah maupun hasil karya yang relatif rendah, sehingga terjadi pengangguran tersembunyi.

**6. Pendidikan.**

Untuk membentuk manusia pembangunan yang sadar akan tanggung jawabnya terhadap masa maupun generasi mendatang terdapat beberapa permasalahan karena tidak terdapatnya keseimbangan antara jumlah maupun peningkatan anak umur sekolah dan fasilitas yang tersedia. Disamping itu terdapat pula pengembangan yang belum serasi antara jenis pendidikan umum dan kejuruan, serta antara sistem pendidikan formal dan non-formal, sehingga masalah pendidikan dalam hubungannya dengan kurangnya tenaga terdidik untuk menunjang kebutuhan pembangunan belum dapat teratasi dengan baik.

Pembinaan terhadap anak didik yang kurang tepat serta keadaan kehidupan ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan banyaknya anak putus sekolah (drop-outs).

Kurang terdapatnya penghargaan yang wajar terhadap tenaga-tenaga pendidik, terutama guru-guru Sekolah Dasar, turut mengakibatkan mutu pendidikan dasar masih rendah.

Kurang adanya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak-anak dalam lingkungan keluarga sendiri mengakibatkan banyak timbulnya masalah kenakalan anak-anak remaja.

#### **7. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.**

Berhasilnya pembangunan harus ditunjang oleh peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurang adanya kemampuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat-guna merupakan masalah dalam proses pembangunan.

#### **8. Data dan Informasi.**

Data dan informasi yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan bagi perencanaan dan pengambilan keputusan, yang merupakan tahap yang penting dalam proses pembangunan.

#### **9. Aparatur Pemerintahan.**

Aparatur pemerintahan yang ada perlu ditingkatkan kemampuannya untuk memenuhi tuntutan pembangunan.

### **C. Sasaran Pokok Pembangunan Daerah.**

Dengan memperhatikan masalah-masalah pokok dan hasil-hasil Pembangunan yang telah dicapai, maka ditetapkan sasaran pokok Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Tersedianya pangan, sandang dan perumahan yang cukup dan merata dengan mutu yang bertambah baik dan harga yang terbeli oleh rakyat banyak ;
2. Makin menurunnya laju pertumbuhan penduduk dan terbukanya lapangan kerja yang makin meluas ;
3. Kesejahteraan rakyat lahir dan batin yang makin merata serta lebih meningkat dengan berhasilnya pembangunan ekonomi ;

4. Keadaan prasarana yang makin baik, baik prasarana ekonomi maupun non ekonomi, terutama prasarana pengairan, pelabuhan, jalan/jembatan, perlistrikan dan pendidikan ;
5. Keresasian dalam usaha pembangunan daerah perkotaan dan daerah pedesaan yang ditujukan pada pertumbuhan pusat-pusat pengembangan, baik didaerah perkotaan maupun pedesaan.

**D. Susunan Prioritas Pembangunan Daerah.**

Berdasarkan atas adanya potensi, permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai, maka prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan kebutuhan primer, yaitu pangan, sandang dan perumahan ;
2. Peningkatan dan perluasan fungsi prasarana ekonomi dan non ekonomi (agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sosial, budaya dan pendidikan) ;
3. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk, terutama dengan transmigrasi dan keluarga berencana ;
4. Peningkatan serta perluasan lapangan dan kesempatan kerja ;
5. Pembangunan daerah pedesaan dan daerah perkotaan ;
6. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya alam ;
7. Pelaksanaan penyusunan tata guna tanah ;
8. Pembinaan dunia usaha ;
9. Penyempurnaan sistim pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan ;
10. Peningkatan dan pembinaan aparatur Pemerintah.

## BAB IV

### STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

#### A. Strategi

Yang dimaksud dengan strategi pembangunan Daerah adalah garis-garis pokok kebijaksanaan yang ditetapkan dengan memperhatikan masalah-masalah pokok serta potensi-potensi yang ada didaerah, guna sejauh mungkin mencapai sasaran pokok Pembangunan Daerah dengan cara yang sebaik-baiknya.

Untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah garis-garis pokok kebijaksanaan tersebut ditentukan sebagai berikut :

1. Pengurangan tekanan kependudukan yang timbul karena besarnya jumlah penduduk dengan laju pertumbuhannya yang masih tinggi dengan jalan :
  - a. Kerja sama yang lebih serasi dengan daerah-daerah Propinsi terutama diluar Jawa untuk memperlancar pelaksanaan program-program transmigrasi ;
  - b. Meresapkan motivasi keluarga berencana serta mengarahkan usaha dalam bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan untuk berhasilnya program keluarga berencana ;
  - c. Pendidikan masyarakat secara sistimatis dan terus-menerus yang mengarah pada peningkatan ketrampilan dan management, dengan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab atas berhasilnya pembangunan bagi keselamatan dan kebahagiaan generasi yang mendatang. .
2. Percepatan pembangunan keempat Wilayah Pembangunan dengan pusat pembangunannya, yaitu Semarang, Pekalongan, Cilacap dan Surakarta melalui peningkatan prasarana perhubungan, khususnya pelabuhan Semarang dan Cilacap, serta peningkatan fasilitas perlistrikan untuk menggalakkan penanaman modal bagi usaha-usaha di Jawa Tengah ;
3. Peningkatan aparatur Pemerintahan supaya lebih mampu/memadai dalam melaksanakan tugas-tugasnya guna mencapai prestasi yang setinggi-tingginya.

## B. Pendekatan.

Yang dimaksud dengan Pendekatan Pembangunan Daerah ialah suatu teknik logika untuk mengetahui hakekat Pembangunan Daerah, agar segala masalah dapat dipahami dan dipecahkan, sesuai dengan keadaan khusus Daerah, namun masih dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dilihat dari penyebaran penduduk, kegiatan ekonomi dan potensi alam yang tersedia, pelaksanaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah menggunakan 2 (dua) macam Pendekatan ialah lewat Regionalisasi dalam Wilayah Pembangunan dan Regionalisasi dalam Daerah Aliran Sungai (DAS).

### 1. Regionalisasi dalam Wilayah Pembangunan.

Melihat penyebaran penduduk, penyebaran kegiatan ekonomi serta potensi yang ada, maka Jawa Tengah dapat dibagi dalam empat wilayah pembangunan ialah sebagai berikut :

- a. Wilayah Utara Jawa Tengah bagian Barat dengan Pekalongan sebagai Pusat Pembangunan ;
- b. Wilayah Utara Jawa Tengah bagian Timur dengan Semarang sebagai Pusat Pembangunan ;
- c. Wilayah Selatan Jawa Tengah bagian Barat dengan Cilacap sebagai Pusat Pembangunan ;
- d. Wilayah Selatan Jawa Tengah bagian Timur dengan Surakarta sebagai Pusat Pembangunan.

### 2. Regionalisasi dalam Daerah Aliran Sungai (DAS).

Khusus untuk pembangunan sektor pertanian yang dapat memberi pengaruh pada sektor-sektor lainnya, maka dipakai pendekatan DAS (= Daerah Aliran Sungai), yaitu :

- a. DAS Pemali-Comal,
- b. DAS Iramu Seluna,
- c. DAS Citanduy,
- d. DAS Serayu,
- e. DAS Kedu Selatan dan
- f. DAS Bengawan Solo.

Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah yang akan dibuat kemudian harus tercermin urutan prioritas pembangunan pada keempat Wilayah Pembangunan tersebut, sesuai dengan potensi

masing-masing, serta jaringan timbal balik antara kota dengan daerah sekitarnya.

Disamping itu dalam Pembangunan Daerah Jawa Tengah harus diusahakan pula keserasian antara Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah dan Wilayah Pembangunan di Propinsi tetangga, sehingga dapat dicapai hasil guna dan daya guna yang setinggi-tingginya.

### C. Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan Daerah.

#### 1. Bidang Ekonomi.

##### a. Pengantar.

- 1). Masalah ekonomi di Jawa Tengah tidak dapat dilepaskan dari masalah kependudukan dengan pendapatan per kapita yang masih sangat rendah. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka Perencanaan Pembangunan Daerah dewasa ini memberikan prioritas pada Bidang Ekonomi, dengan titik berat pada sektor pertanian dan sektor industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku serta peningkatan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

Dengan demikian arah kebijaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi diujukan untuk meningkatkan pendapatan per kapita, dengan mendorong meningkatnya kegiatan-kegiatan pada sektor pertanian dan perindustrian untuk merombak struktur ekonomi Jawa Tengah dari struktur ekonomi yang berat sebelah kepada produksi bahan mentah dan hasil-hasil pertanian, ke arah struktur ekonomi yang lebih seimbang.

- 2). Selain usaha tersebut diatas yang pada hakekatnya merupakan usaha meningkatkan pertumbuhan produksi barang dan jasa, maka diusahakan pula peningkatan pengolahan sumber-sumber potensiil yang dapat menunjang terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat.
- 3). Kebijaksanaan peningkatan pertumbuhan produksi barang dan jasa dilaksanakan bersama-sama dengan usaha pemerataan pembagian hasil-hasil pembangunan dan usaha memperluas kesempatan kerja, dengan terus membina swadaya, merangsang prakarsa dan meningkatkan keikutsertaan seluruh masyarakat.
- 4). Usaha pemerataan pembagian hasil-hasil pembangunan dilakukan dengan penyebaran pelaksanaan pembangunan ke seluruh daerah-daerah, yang sekaligus dapat meningkatkan penghasilan anggota

masyarakat karena kegiatannya yang produktif, dengan perhatian khusus kepada daerah-daerah yang secara potensiil belum berkembang.

- 5). Selain usaha tersebut diatas, ditingkatkan pula program-program bagi kelompok-kelompok masyarakat dengan mata pencaharian yang masih sangat rendah tingkat penghasilannya, seperti : nelayan, pengrajin, petani penggarap dan petani pemilik tanah sempit. Dalam hubungan ini perlu diusahakan peningkatan peranan koperasi produksi dibidang pertanian, perkebunan rakyat, peternakan, perikanan dan kerajinan rakyat.
- 6). Usaha perluasan kesempatan kerja dilakukan dengan memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada pengusaha-pengusaha kecil dan menengah untuk memperluas dan meningkatkan usahanya, yang berarti memperluas keikutsertaan golongan ekonomi lemah dengan mengusahakan kesempatan untuk memperkuat pemodalannya, meningkatkan keahliannya dalam mengurus perusahaan serta memperluas pemasaran hasil produksinya.
- 7). Dalam rangka peningkatan pertumbuhan produksi barang dan jasa serta perluasan kesempatan kerja, diusahakan peningkatan fungsi-fungsi prasarana ekonomi dan produksi untuk menciptakan iklim yang sebaik-baiknya bagi peningkatan penanaman modal di Jawa Tengah, dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam serta pertumbuhan keempat Wilayah Pembangunan beserta Pusat-pusatnya.
- 8). Kebijakan perdagangan ditujukan untuk memperlebar arus barang dan jasa yang menunjang produksi pertanian dan perindustrian serta tersedianya bahan pangan, sandang dan perumahan bagi masyarakat dengan jalan mengembangkan prasarana dan kelembagaan perdagangan yang membantu pengembangan pemasaran hasil produksi.
- 9). Untuk menunjang pembangunan Bidang Ekonomi di Jawa Tengah, maka kegiatan transmigrasi ditingkatkan secara intensif, terutama dengan mengadakan kerja sama antar Daerah, dengan tekanan mengusahakan persiapan-persiapan di daerah asal dan terutama di daerah tujuan yang memungkinkan perkembangan kehidupan dan penghidupan yang lebih baik.

**b. Pertanian.**

Kebijakan pembangunan Pertanian diarahkan pada pemeliharaan kelangsungan peningkatan produksi pertanian, khususnya

pertanian pangan dan produksi pertanian lainnya untuk ekspor serta peningkatan bahan pertanian lain yang dapat membantu perkembangan industri, dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam dalam rangka usaha penyelamatan hutan, tanah dan air.

- 1). Para Pertanian Pangan peningkatan produksi diusahakan melalui peningkatan pelaksanaan intensifikasi sistim Bimas/Inmas dengan panca Usaha lengkap, diversifikasi vertikal dan horisontal terhadap tanaman padi, polowijo dan hortikultura ; kesemuanya itu dengan memperhatikan tingkat kemampuan petani berproduksi dan perkembangan teknologi tepat-guna.

Usaha-usaha kemampuan tersebut dilakukan dengan penyempurnaan sistim pengadaan serta distribusi sarana produksi (benih unggul, pupuk, pestisida, insektisida dan lain-lainnya) dan peningkatan pendaya gunaan jaringan pengairan yang tersedia, disamping peningkatan usaha-usaha pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharannya, sehingga memperluas areal pengairan.

Untuk meningkatkan kemampuan berproduksi pada petani ditingkatkan kegiatan dalam bidang penyuluhan, baik dalam usaha intensifikasi pengusahaan tanaman, maupun dalam usaha intensifikasi penggunaan tanah serta pemanfaatan pengairan.

Guna dapat merangsang peningkatan produksi perlu ditingkatkan prasarana, sarana serta organisasi pemasaran hasil-hasil pertanian dan penetapan kebijaksanaan harga yang dapat melindungi baik produsen maupun konsumen.

- 2). Pada Perkebunan Rakyat usaha peningkatan produksi dilaksanakan melalui intensifikasi pembinaan penyuluhan untuk merubah cara-cara pengusahaan dari pola pertanaman Perkebunan yang masih tradisional kepada cara-cara usaha tani perkebunan dengan memperhatikan faktor-faktor teknis yang lebih baik, terutama yang mengarah kepada peningkatan kesadaran petani akan pemberantasan hama/penyakit dan penggunaan benih-benih unggul serta peningkatan diversifikasi tanaman.

Untuk lebih menggairahkan usaha peningkatan produksi, perlu diusahakan prasarana dan sarana pengolahan dan pemasaran yang lebih menguntungkan bagi para petani perkebunan, disamping penyediaan kredit investasi dengan syarat yang tidak memberatkan.

Pada Perkebunan Besar peningkatan produksi diarahkan kepada peningkatan devisa dan pendapatan rupiah serta pemenuhan kebutuhan dalam negeri akan bahan-bahan baku hasil perkebunan.

Usaha tersebut dilaksanakan melalui peningkatan efisiensi usaha Perkebunan Besar, baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk dalam PNP/PTP, dengan jalan meningkatkan segi-segi teknis dan management usaha perkebunan, mengusahakan kesempatan memperkuat permodalan serta meningkatkan pemasarannya.

- 3). Kebijakan pada Peternakan diarahkan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan menciptakan kondisi yang baik bagi perkembangan industri ternak.

Usaha tersebut dilaksanakan dengan Panca Usaha Ternak disertai dengan intensifikasi penyuluhan dan peningkatan ketrampilan, baik untuk pemeliharaan ternak maupun untuk pengolahan hasilnya serta peningkatan pencegahan penyakit menular.

Untuk meningkatkan usaha peternakan perlu adanya penyediaan kredit investasi dengan syarat yang tidak memberatkan, pengembangan koperasi peternakan, perbaikan sistim pemasaran, penetapan kebijaksanaan harga serta pengembangan industri-industri yang menunjang perkembangan usaha peternakan.

- 4). Pada Perikanan kebijaksanaan peningkatan produksi diarahkan terutama kepada pembinaan perikanan rakyat sebagai unsur yang lemah, baik dalam kemampuan teknik maupun ekonominya.

Kebijaksanaan tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kegiatan pendidikan, penyuluhan dan penelitian regional perikanan, modernisasi dalam cara-cara penangkapan dan budidaya ikan, peningkatan prasarana dan sarana perikanan, termasuk pelabuhan nelayan/perikanan, penyediaan kredit investasi dengan syarat yang tidak memberatkan, peningkatan pengembangan koperasi-koperasi perikanan, penetapan kebijaksanaan harga, perbaikan sistim pemasaran dan perlindungan nelayan terhadap persaingan yang tidak sehat.

- 5). Pada Kehutanan yang mempunyai fungsi ekonomis, hidrologis, orologis dan estetis, sebagai sumber bahan baku kayu, sumber humus alami dan pengendalian erosi, maka kebijaksanaan pembangunan kehutanan diarahkan pada peningkatan reboisasi, rehabilitasi dan penghijauan, sesuai dengan tata guna tanah yang tepat. Untuk itu perlu peningkatan pengawasan terhadap pengusa-

haan hutan. Khusus terhadap pengusahaan hutan jati perlu diadakan langkah-langkah untuk meningkatkan fungsi ekonominya sebagai sumber devisa dan bahan baku industri kayu serta meningkatkan partisipasi rakyat didalam wilayah lingkungan hutan untuk aktif turut serta dalam segi pengamanannya dengan jalan memberikan bantuan peningkatan kehidupan sosial ekonominya.

c. Perindustrian.

- 1). Kebijakan pembangunan perindustrian diarahkan kepada terciptanya iklim yang mendorong penanaman modal dalam jenis-jenis industri yang sesuai dengan pengembangan wilayah industri yang bersangkutan.
- 2). Jenis-jenis industri yang diprioritaskan pengembangannya adalah industri-industri yang mengolah hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor serta jenis-jenis industri yang mengolah bahan baku yang berasal dari pertambangan, seperti pasir besi, bahan semen, marmer dan sebagainya.
- 3). Diusahakan pula pengembangan industri-industri yang menghasilkan barang-barang keperluan konsumen, karena mempunyai manfaat yang sangat luas dan berfungsi selain mendekatkan produsen dengan konsumen, juga memperluas lapangan kerja.
- 4). Disamping itu dikembangkan pula jenis-jenis industri yang dapat memanfaatkan pelabuhan, khususnya pelabuhan alam yang baik di Cilacap, yang akan mendorong masuknya jenis-jenis industri lain di wilayah tersebut, yang sebaliknya juga akan mempercepat pengembangan pelabuhan itu sendiri.
- 5). Industri-industri rakyat yang masih mempergunakan bahan bakar kayu dipersiapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk dapat mengalihkan cara pengolahannya dengan mempergunakan bahan bakar bukan kayu, terutama dengan akan adanya pabrik pengolahan minyak mentah di Cilacap, untuk menjaga kelestarian hutan dan pepohonan di Jawa Tengah.
- 6). Dengan tidak menolak pembangunan industri baru yang menggunakan padat modal dengan teknologi modern, maka prioritas masih diberikan kepada industri-industri yang lebih banyak menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, kebijaksanaan dalam pembangunan industri baru harus diusahakan agar saling melengkapi dan menghidupi industri-industri lain yang telah ada yang terbukti telah memberikan lapangan penghidupan luas kepada masyarakat.

- 7). Kepada industri kerajinan rakyat yang menyerap banyak tenaga kerja diberikan prioritas dalam hal bantuan dan fasilitas penyuluhan, peningkatan cara kerja dan mutu hasil kerajinan, kelembagaan, management, pemasaran serta penunjangan.
- 8). Peningkatan prasarana-prasarana fisik, seperti adanya pelabuhan yang baik, terutama pelabuhan Semarang, tenaga listrik dan penyediaan air minum yang cukup, perencanaan wilayah-wilayah industri yang tepat dan peningkatan kedayagunaan dan kehasilgunaan lembaga yang terlibat merupakan persyaratan yang mutlak guna pengembangan industri, disamping faktor keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam.

d. **Pertambangan.**

- 1). Dengan mengingat peraturan per-undang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan pertambangan diarahkan kepada peningkatan usaha penelitian, pencaharian dan inventarisasi potensi bahan tambang yang terdapat di Jawa Tengah, baik yang didukung oleh dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Swasta dengan tujuan untuk meningkatkan investasi usaha pertambangan di Jawa Tengah.
- 2). Khusus bagi bahan-bahan galian golongan C (yaitu yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah) perlu diadakan penelitian, perencanaan, pengaturan dan peningkatan/peluasan pengusahaannya, untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pembangunan Daerah dan perluasan kesempatan kerja, dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan kerja, keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam.

e. **Perhubungan dan Telekomunikasi.**

Kebijaksanaan pembangunan Perhubungan diarahkan untuk mengusahakan adanya pola transportasi yang terpadu dalam wilayah Jawa Tengah sebagai bagian dari pada pola transportasi Nasional yang terpadu dengan memperhatikan faktor-faktor koordinasi, efisiensi, keamanan serta kelancaran lalu lintas orang, barang dan jasa serta pengamanan dan pemeliharaan bangunan-bangunan perhubungan yang ada.

Mengingat peningkatan kebutuhan perhubungan dan telekomunikasi, maka peningkatan prasarana dan sarana perhubungan merupakan persyaratan yang mutlak.

- 1). Pada Perhubungan Darat diusahakan peningkatan, pembinaan, pengarahannya, pengawasan dan koordinasi potensi lalu lintas angkutan jalan raya dan kereta api untuk mencapai keserasian antara fungsi angkutan jalan raya dan kereta api. Khusus pengamanan jalan raya dan jembatan perlu mendapat perhatian yang utama.
- 2). Pada Perhubungan Laut diusahakan peningkatan prasarana dan sarana pelabuhan laut, untuk memperlancar perhubungan antar pulau dan Internasional, terutama agar pelabuhan Semarang menjadi pelabuhan samodera sebagai pintu gerbang Jawa Tengah.
- 3). Pada Perhubungan Udara diusahakan peningkatan fasilitas darat yang menunjang perhubungan udara, sehingga mampu menampung peningkatan fungsi pelabuhan udara sebagai pintu gerbang perekonomian dan pariwisata.
- 4). Pada Pos, Giro dan Telekomunikasi diusahakan peningkatan prasarana dan sarana, perluasan jaringan dan peningkatan pelayanan serta kelembagaan, agar dapat menunjang usaha-usaha pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna.

#### f. Prasarana.

##### 1). Irigasi.

Sehubungan dengan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang sampai dengan REPELITA ke IV masih menitik beratkan pada pembangunan pertanian, maka untuk Daerah Jawa Tengah faktor bangunan dan jaringan pengairan (irigasi) merupakan prasarana yang pokok.

Oleh karena itu, kebijaksanaan mengenai bangunan dan jaringan pengairan diarahkan untuk menemukan sistem pengembangan dan pengusahaan secara menyeluruh dalam arti jelas kaitan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, baik antar instansi pemerintah (sektoral, regional dan pedesaan) maupun antara pemerintah dan masyarakat.

Kebijaksanaan tersebut dilaksanakan dengan dilanjutkannya usaha-usaha penelitian yang berhubungan dengan teknik pengaturan serta manajemen eksploitasi dan pemeliharaan, disamping diadakannya/diteruskannya studi Pola Induk Pengembangan Irigasi di Jawa Tengah terhadap kemungkinan-kemungkinan pengembangan pada daerah-daerah aliran sungai disertai pemeliharaan kelestarian lingkungan yang didukung dana dari Pemerintah Daerah. Disamping itu perlu usaha-usaha penyelesaian, rehabilitasi dan penyempurnaan inventarisasi bangunan dan jaringan pengairan yang ada.

Selanjutnya, perlu ditentukan suatu pola eksploitasi dan pemeliharaan serta pembiayaan bangunan dan jaringan pengairan yang menuju kepada peningkatan fungsi dan manfaat bangunan dan jaringan tersebut secara optimal dengan menggariskan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah secara jelas dan sekaligus menimbulkan rasa/kesadaran pemilikan dan tanggung jawab pemeliharaan bagi masyarakat, khususnya yang mendapat manfaat dari adanya bangunan-bangunan dan jaringan tersebut.

## 2). Jalan dan Jembatan.

Kebijaksanaan pembangunan jalan dan jembatan diarahkan kepada usaha untuk mengembangkan pusat-pusat pengembangan maupun daerah pedalaman dengan tetap memperhatikan pola transportasi yang terpadu.

Langkah-langkah yang perlu diusahakan adalah memperluas jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan daerah-daerah yang memproduksi bahan pangan, bahan ekspor dan lain-lain dengan daerah konsumen dan pelabuhan ; selanjutnya menambah jaringan jalan ke daerah pedesaan dan daerah-daerah yang lain yang masih terisolir.

Disamping itu usaha perbaikan serta pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan perlu mendapat prioritas.

## 3). Perlistrikan.

Kebijaksanaan pembangunan perlistrikan di Jawa Tengah diarahkan untuk meningkatkan penyediaan tenaga listrik, yang sangat perlu untuk menggairahkan investasi dalam sektor industri maupun untuk memenuhi keperluan konsumsi.

Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama diusahakan tercapainya keseimbangan volume maupun kapasitas penyediaan tenaga listrik antara Jawa Tengah dan daerah-daerah tetangga (Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya). Langkah-langkah yang perlu diusahakan adalah pembangunan pembangkit-pembangkit tenaga listrik baik yang berjenis tenaga air, tenaga uap, tenaga gas dan tenaga diesel maupun tenaga yang lain. Disamping itu perlu diselesaikan jaringan transmisi, distribusi dan jaringan interkoneksi antara perlistrikan di Jawa Tengah dan perlistrikan daerah tetangga.

Khusus dalam daerah pedesaan yang berada diluar jangkauan Perusahaan Listrik Negara diusahakan pembangunan perlistrikan pedesaan, baik yang digerakkan melalui tenaga mikro hidro, maupun tenaga diesel.

Dalam hal pembangunan perlistrikan pedesaan perlu diadakan penelitian-penelitian yang seksama yang ditujukan kepada jenis pembangkit tenaga listrik yang dapat dibangun ditempat yang bersangkutan untuk kelangsungan pengelolaan unit perlistrikan yang baik yang mengarah kepada pengambilan manfaat yang sebesar-besarnya maupun perluasan usaha diwaktu yang mendatang.

#### **g. Pembangunan Daerah Perkotaan dan Pedesaan**

##### **1). Pembangunan Daerah Perkotaan.**

Kebijaksanaan pembangunan daerah Perkotaan di Jawa Tengah diarahkan kepada pertumbuhan kota sebagai pusat-pusat pengembangan wilayah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi sosial ekonomi diwilayah yang bersangkutan, dengan mengingat keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam. Langkah-langkah yang diusahakan ialah kegiatan-kegiatan pembangunan yang mengarah kepada pemerataan manfaat bagi masyarakat luas.

Dalam perencanaan pembangunan perkotaan diutamakan fungsi intern, yaitu penyediaan kebutuhan-kebutuhan permukiman dalam kota, penentuan lokasi-lokasi untuk kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi dan kebudayaan serta penyediaan fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan itu.

Disamping fungsi intern, maka fungsi ekstern perlu dipertimbangkan pula. Dalam memenuhi fungsi ekstern tersebut digariskan kegiatan-kegiatan antara kota dan wilayah sekitarnya secara timbal balik, juga hubungannya dengan wilayah yang lebih atas dengan menempatkan masing-masing sebagai unsur yang saling melengkapi. Untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut diusahakan peningkatan prasarana dan sarana, baik fisik maupun instruksional yang diperlukan.

Langkah-langkah kegiatan sebagaimana tersebut diatas perlu dirumuskan secara jelas dalam Rencana Induk Pembangunan Kota.

##### **2). Pembangunan Daerah Pedesaan.**

Kebijaksanaan Pembangunan Daerah Pedesaan diarahkan pada menumbuhkan pembangunan pedesaan didalam jaringan wilayah yang lebih luas, sehingga merupakan kesatuan pengembangan dengan pembangunan daerah perkotaan. Langkah-langkah yang perlu diusahakan ialah menambah dan memperlancar hubungan antar desa serta antara desa dan kota, baik dalam segi fisik maupun institusional. Perhatian

khusus diberikan kepada daerah-daerah pedesaan yang nisbi kurang berkembang.

Disamping itu diusahakan pendaya gunaan potensi wilayah serta peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran membangun pada masyarakat pedesaan untuk lebih meningkatkan peranannya dalam kegiatan-kegiatan pembangunan.

Faktor lain yang juga perlu diperhatikan ialah pengembangan kelembagaan di daerah pedesaan dibidang pemerintahan, ekonomi, sosial dan kebudayaan untuk menuju kepada masyarakat desa swasembada.

#### **h. Pariwisata.**

Kebijaksanaan pembangunan Pariwisata diarahkan kepada usaha menciptakan iklim yang baik untuk meningkatkan dan memajukan industri kepariwisataan di Jawa Tengah dengan mendorong usaha-usaha swasta untuk lebih mampu berperan dalam pengembangan sektor tersebut.

Langkah-langkah yang perlu diusahakan ialah meningkatkan penelitian, inventarisasi, pembinaan dan pengembangan obyek-obyek pariwisata, penyempurnaan prasarana dan sarana kepariwisataan serta meningkatkan usaha-usaha promosi dan penerangan untuk memperluas pemasaran kepariwisataan, baik didalam maupun diluar negeri.

#### **i. Transmigrasi.**

Kebijaksanaan pembangunan Transmigrasi diarahkan kepada peningkatan jumlah maupun mutu transmigran yang perlu diberangkatkan ke daerah-daerah transmigrasi, terutama diluar pulau Jawa.

Langkah-langkah yang perlu diusahakan adalah penelitian-penelitian yang seksama tentang daerah yang akan dijadikan daerah transmigrasi, terutama dilihat dari segi daya tampung daerah, dengan memperhitungkan faktor-faktor kemungkinan pengembangan wilayah yang bersangkutan, khususnya dari segi tata guna tanah yang dihubungkan dengan potensi sumber alam daerah tersebut.

Usaha selanjutnya ditujukan untuk menumbuhkan kerja sama antar daerah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam merumuskan pelaksanaan transmigrasi tersebut secara seksama, agar para transmigran benar-benar berperan didalam usaha pengembangan daerah

yang bersangkutan dan sekaligus membuka lapangan kehidupan yang baik bagi mereka.

Bagi keperluan para transmigran perlu diberikan penerangan dan penyuluhan untuk menimbulkan minat dan kesadaran masyarakat mengenai manfaat bertransmigrasi, terutama bagi daerah-daerah yang padat penduduknya, daerah minus dan daerah-daerah yang sering dilanda bencana alam.

#### **j. Koperasi**

Kebijaksanaan pembangunan Koperasi diarahkan sebagai suatu gerakan untuk meningkatkan taraf hidup golongan masyarakat yang luas, terutama golongan ekonomi lemah, dan sebagai suatu sistem usaha dalam bidang ekonomi yang memungkinkan ke-ikut sertaan masyarakat sebanyak-banyaknya.

Pada tahap-tahap pertama langkah-langkah yang diusahakan adalah memberikan pendidikan dasar, praktek atau usaha ekonomi yang berhubungan dengan faktor-faktor management, ketrampilan/pengalaman, permodalan, pengenalan barang, termasuk segi-segi pengolahan dan pemasarannya, dengan tujuan untuk menumbuhkan anggota koperasi yang cakap, bertanggung jawab dan memiliki kesadaran berkoperasi yang tinggi.

Pada tahap selanjutnya langkah-langkah perlu diusahakan untuk dapat memberikan peranan kepada lembaga-lembaga koperasi dalam pelbagai bidang untuk turut serta dalam pengembangan ekonomi daerah maupun Nasional melalui usaha pembinaan secara terus-menerus dan pemberian prioritas maupun fasilitas yang wajar, sehingga dapat tumbuh sebagai kekuatan ekonomi masyarakat yang sehat.

#### **k. Perdagangan.**

Kebijaksanaan pembangunan Perdagangan diarahkan untuk meningkatkan fungsinya yang pokok sebagai penunjang kegiatan-kegiatan yang lain, terutama dalam memperlancar dan meningkatkan arus barang dan jasa antara produsen dan konsumen dalam ruang lingkup lokal, regional, Nasional maupun Internasional dan sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan pendapatan.

Langkah-langkah ditujukan untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu serta memelihara stabilitas harga barang sebagai faktor penunjang perkembangan kegiatan produksi barang dan jasa. Disam-

ping itu diusahakan peningkatan tertib niaga untuk lebih menjamin kemantapan kegiatan usaha pada umumnya.

Untuk keperluan pembangunan Perdagangan sendiri diusahakan peningkatan prasarana dan sarana perhubungan, baik fisik maupun institusional, terutama prasarana pelabuhan yang baik sebagai pintu gerbang arus keluar masuknya barang dan jasa.

Guna menunjang kegiatan-kegiatan industri dan pertanian dipikirkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mendukung perkembangan jenis industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku dan bahan baku menjadi bahan jadi, dengan jalan memperluas pemasarannya, demikian pula untuk kegiatan kerajinan rakyat yang menyerap banyak tenaga kerja.

Untuk menunjang perkembangan usaha jenis-jenis industri yang baru terhadap saingan dari luar negeri, kebijaksanaan perpajakan yang dikaitkan dengan kebijaksanaan perdagangan yang memberikan perlindungan yang wajar terhadap hasil-hasil industri dalam negeri yang bersangkutan masih perlu dilanjutkan secara selektif.

Bagi kelangsungan penyediaan bahan-bahan pokok kebutuhan hidup rakyat banyak sistem pengadaan yang baik disertai dengan kebijaksanaan penentuan harga terendah maupun tertinggi perlu diteruskan, yang sekaligus diujukan tidak hanya untuk melindungi konsumen, tetapi juga untuk menggairahkan produsen.

#### 1. Pembinaan Dunia Usaha

Kebijaksanaan dalam Pembinaan Dunia Usaha diarahkan kepada usaha untuk mendorong prakarsa dan mutu, dengan memberikan peranan yang lebih luas dalam pembangunan Daerah. Langkah-langkah yang perlu diusahakan adalah meningkatkan keikutsertaan Dunia Usaha dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan menumbuhkan lembaga-lembaga pasar modal serta pusat-pusat informasi dunia usaha.

Disamping itu hasil produksi Nasional didaerah masih perlu diberi perlindungan terhadap persaingan yang tidak sehat, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Khusus bagi pengusaha golongan ekonomi lemah dan menengah diusahakan peningkatan kecakapan teknis serta ketrampilan management, dorongan untuk berorganisasi dalam bentuk badan hukum, pemberian fasilitas dan peningkatan permodalannya, dengan pemberian kredit investasi serta modal kerja permanen dengan syarat yang tidak memberatkan.

Kebijaksanaan pembinaan Perusahaan Daerah diarahkan kepada peningkatan peranan serta keikutsertaannya dalam dunia usaha, persaingan sehat antar usaha dan sekaligus pemeliharaan fungsinya sebagai sumber pendapatan daerah.

Fungsi Perusahaan Negara yang ada di Jawa Tengah diarahkan kepada peningkatan sumbangannya kepada Pembangunan Daerah, terutama ditinjau dari segi pelayanan terhadap masyarakat, pengolahan sumber-sumber potensi secara tepat dan keserasian usahanya dengan sasaran serta prioritas pembangunan Daerah dan kesempatan untuk sebanyak mungkin menampung tenaga kerja.

## 2. Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya.

### a. Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- 1). Sesuai dengan azas pemikiran dalam keseimbangan, maka pembangunan perikehidupan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus diarahkan kepada terwujudnya manusia-manusia pembangunan yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta terhadap Negara, Bangsa dan Tanah Air Indonesia serta makin meningkatnya keserasian antara pembangunan fisik materiil dan mental spiriuil.
- 2). Pembangunan perikehidupan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditujukan agar segenap warga masyarakat makin mempertebal keimanannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lebih menghargai nilai-nilai spirituil, moral dan akhlak yang luhur, serta makin besar keikut-sertaan dan amalnya dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah, dalam suasana hidup rukun antar sesama umat beragama dan sesama penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 3). Dalam hal ini perlu diusahakan bertambahnya sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang menuju ketata hidup yang sesuai dengan Pancasila.
- 4). Disamping itu perlu diusahakan pula pengembangan pendidikan ketrampilan dan pengembangan seni budaya yang bernafaskan keagamaan/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada perguruan-perguruan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta penyediaan prasarana pene-

rangan/penyuluhan Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

**b. Kesehatan, Sosial dan Keluarga Berencana.**

- 1). Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, sehingga dapat membantu laju Pembangunan Daerah dengan tersedianya tenaga kerja yang sehat.
- 2). Pembangunan dibidang kesejahteraan sosial diarahkan kepada terwujudnya ketahanan sosial bagi seluruh masyarakat, sehingga tidak ada lagi golongan masyarakat yang terhambat perkembangannya, baik dalam segi moral, mental, jasmaniah, sosial dan budaya, maupun ekonomi.
- 3). Kegiatan Keluarga Berencana diarahkan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk dan memperbaiki struktur umur penduduk, menuju tercapainya keluarga bahagia dan sejahtera. Untuk itu perlu ditingkatkan prasarana dan sarannya, agar pelaksanaan Keluarga Berencana dapat merupakan bagian dari sikap hidup masyarakat.

**c. Pendidikan, Penelitian, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pembinaan Generasi Muda.**

- 1). Pada hakekatnya pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuannya yang dilaksanakan baik dalam maupun diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, pembinaan dan pelaksanaannya merupakan tanggung jawab bersama dari keluarga, masyarakat dan Pemerintah. Usaha tersebut harus diarahkan untuk membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila, sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, serta dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan pembangunan.
- 2). Pendidikan masyarakat diarahkan kepada peningkatan pembinaan kesadaran keluarga dan masyarakat akan pentingnya pendidikan keluarga melalui penerangan dan penyuluhan.
- 3). Kebijakan pendidikan diarahkan kepada peningkatan prasarana dan sarana pendidikan formal, baik mutu maupun jumlahnya, diutamakan pada Sekolah-sekolah Dasar di daerah pedesaan untuk menghasilkan tamatan-tamatan Sekolah Dasar yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang berguna bagi dirinya maupun pembangunan. Adapun kepada anak-anak putus sekolah

- (drop-outs) diberikan pendidikan non-formil, agar mampu menolong dirinya dan berfungsi dalam pembangunan.
- 4). Kebijakan pendidikan non-formil diarahkan kepada peningkatan prasarana dan sarana pendidikan non-formil sehingga terdapat keserasian antara pembinaan serta pengembangan pendidikan formil dan pendidikan non-formil, yang dibarengi dengan usaha pembinaan kesadaran masyarakat untuk aktif menunjang usaha pendidikan, baik dalam segi pelaksanaan maupun pembiayaannya.
  - 5). Dalam pada itu guna mengisi kekurangan tenaga ahli tingkat menengah diusahakan bertambahnya lembaga pendidikan kejuruan yang menghasilkan tenaga tersebut.
  - 6). Kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berorientasi kepada pembangunan, baik dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun dalam penilaian hasil-hasil pembangunan, dengan mengingat potensi daerah yang segera dapat dikembangkan. Dalam hal ini prioritas pengembangan keahlian dan prioritas penelitian harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan, sedang hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan harus dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan perkembangan ilmu pengetahuan.
  - 7). Untuk mencapai hal itu perlu dijalin koordinasi yang baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan teknologi agar lebih mendekatkan pengertian dan kesadaran akan pentingnya peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan.
  - 8). Pembinaan Generasi Muda sebagai tunas Bangsa yang ber-Pancasila dan sebagai penerus nilai-nilai 1945 bertujuan membentuk generasi penerus yang lebih baik, lebih bertanggung jawab dan lebih mampu mengisi dan membina kemantapan Bangsa. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan dibidang ini diarahkan kepada peningkatan potensi serta peranan pemuda untuk meningkatkan Pembangunan Daerah dan menciptakan lapangan kerja.
  - 9). Peningkatan pembinaan pemuda, baik yang melalui lingkungan keluarga dan sekolah, maupun yang melalui organisasi kepemudaan, antara lain Pramuka, dan yang melalui PKK perlu dibarengi dengan peningkatan prasarana dan sarana serta peningkatan usaha-usaha preventif dan represif terhadap pengaruh kenakalan remaja, narkoba dan kebudayaan asing yang merusak kepribadian Bangsa.

- 10). Peningkatan pembinaan keolahragaan, baik melalui pendidikan maupun organisasi keolahragaan, ditujukan untuk membentuk manusia pembangunan yang sehat, jasmaniah maupun rohaniyah, dan merupakan sumbangan serta keikutsertaan daerah dalam peningkatan mutu keolahragaan ditingkat Nasional dan Internasional.

d. **Kebudayaan.**

- 1). Pembinaan kebudayaan diarahkan kepada penggalian, pemeliharaan, pemupukan dan pengembangan Kebudayaan Daerah sebagai unsur penting yang memperkaya dan memberi corak Kebudayaan Nasional dalam rangka memperkuat kepribadian Bangsa, kebanggaan Nasional dan Kesatuan Nasional.
- 2). Usaha peningkatan pembinaan Kebudayaan tersebut meliputi inventarisasi, pemeliharaan, penelitian dan penyelamatan warisan sejarah Kebudayaan Daerah, pembinaan, peningkatan dan pengembangan kesenian/kebudayaan Daerah, dengan mengembangkan Pusat-pusat kebudayaan/kesenian Daerah, pembinaan bahasa dan kesusastraan Daerah serta peningkatan fasilitas kustasikaan kebudayaan Daerah.

e. **Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja.**

- 1). Kebijakan mengenai tenaga kerja dan kesempatan kerja ditujukan untuk mengatasi masalah penganggaran, terutama di pedesaan, dengan membuka lapangan kerja baru dan mengarahkan proyek-proyek pembangunan yang sebanyak mungkin menyerap tenaga kerja.

\*Dengan demikian pola pembangunan industri di daerah-daerah perlu dikaitkan dengan usaha penambahan lapangan kerja baru.

- 2). Bagi mereka yang sudah mendapat lapangan kerja perlu dilaksanakan usaha-usaha perlindungan dan perawatan kerja/huruh, termasuk didalamnya peningkatan jaminan sosial dan kesejahteraan buruh, dengan memperhatikan masalah penggunaan tenaga wanita, anak-anak dan tenaga asing.

Dalam hubungannya dengan pembinaan penggunaan tenaga kerja, perlu pula diusahakan peningkatan mutu tenaga kerja melalui berbagai latihan kerja, agar tenaga kerja yang ada memiliki kecakapan dan ketrampilan yang cukup dan bahkan mampu menciptakan lapangan kerja baru.

**f. Perumahan.**

- 1). Kebijakan pelaksanaan perumahan diarahkan kepada usaha perluasan penyuluhan untuk meningkatkan ketrampilan rakyat dalam teknik pembangunan perumahan serta kegiatan penyuluhan dalam rangka pemugaran perumahan dan lingkungan desa, agar makin banyak rakyat yang mendiami rumah yang sehat dalam lingkungan yang sehat, tanpa meninggalkan nilai teknis dan estetika Jawa Tengah.
- 2). Didaerah perkotaan usaha ini dilaksanakan dalam bentuk perbaikan kampung, khususnya didaerah yang berpenghasilan rendah yang sangat membutuhkan peningkatan fasilitas sosial dan perumahan.
- 3). Usaha pemenuhan perumahan rakyat yang layak dikaitkan dengan usaha penyebaran yang lebih merata kegiatan pembangunan didaerah.

Dalam hal ini hasil-hasil penelitian mengenai bahan bangunan yang memenuhi syarat dan murah perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya serta diarahkan kepada pengembangan industri bahan bangunan dan industri konstruksi.

- 4). Selanjutnya perlu pula dikembangkan lembaga-lembaga Pemerintah dan Swasta yang menangani perumahan, baik penyuluhan maupun pengadaannya.

**3. Bidang Umum.**

**a. Politik, Keamanan dan Ketertiban.**

- 1). Kebijakan pembinaan politik, keamanan dan ketertiban umum didaerah, diarahkan terutama kepada terciptanya stabilitas politik, keamanan dan ketertiban, sehingga secara keseluruhan tidak akan terjadi gangguan terhadap stabilitas ideologi politik, perekonomian, sosial dan budaya, pertahanan, keamanan dan ketentraman, untuk dapat terciptanya pemusatan perhatian serta keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh.
- 2). Usaha pembinaan politik dilaksanakan dalam bentuk pembinaan ideologi politik dan pembinaan masyarakat serta kekuatan sosial politik lainnya didaerah.
- 3). Usaha pembinaan keamanan dan ketertiban umum antara lain dilaksanakan dalam bentuk pembinaan tertib hukum dan perundang-undangan, sehingga mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan hukum, sesuai dengan tingkat kesadaran hukum yang ada. Dalam pada itu, senantiasa dilaksanakan peningkatan kewas-

padaan terhadap bahaya laten komunisme dan subversi serta bentuk kejahatan lainnya, sedang pembinaan dan peningkatan potensi dan fungsi pertahanan sipil dan perlawanan rakyat (Hansip/Wanra) dilaksanakan sesuai dengan politik dan strategi pertahanan dan keamanan Nasional yang diterapkan didaerah.

**b. Aparatur Pemerintah Daerah.**

- 1). Penertiban, peningkatan serta pemeliharaan daya guna dan hasil guna aparatur pemerintahan didaerah meliputi usaha-usaha yang bersifat menyeluruh yang mencakup segi organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, sarana dan fasilitas kerja. Hal ini diperlukan dalam rangka terwujudnya aparatur kerja. Hal ini diperlukan dalam rangka terwujudnya aparatur yang berwibawa, berhasil guna, berdaya guna, bersih dan setia dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pemerintahan umum maupun pembangunan didaerah, baik secara struktural maupun fungsional. Usaha penyederhanaan serta pembaharuan tata-cara, tata urutan dan tata-kerja dilakukan dengan senantiasa memperhatikan tata pemakaian ruangan, benda dan waktu yang sebaik-baiknya.
- 2). Dalam hubungannya dengan usaha ini dilaksanakan juga usaha pembaharuan administrasi, terutama administrasi pembangunan, khususnya yang bertalian dengan segi kepastian yang diarahkan pada adanya suatu jaringan data dan informasi yang terpadu dan benar.
- 3). Dalam segi kepegawaian diusahakan pembinaan dalam hal data, pengadaan, komposisi, formasi, pendidikan serta latihan, sistim karier, pensiun, kesejahteraan dan ketatausahaan kepegawaian didaerah, yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4). Dalam segi sarana dan fasilitas kerja, baik administrasi dan mobilitas, maupun ruangan/gedung, diusahakan penertiban, peningkatan serta pemeliharaan, sesuai dengan norma-norma tata pemakaian ruangan dan benda, kebutuhan akan peningkatan mutu, pembinaan karier dan kesejahteraan pegawai, kebutuhan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pengendalian operasional pembangunan.

**c. Penerangan.**

- 1). Kebijakan dalam kegiatan penerangan diarahkan untuk menimbulkan serta menggairahkan keikut-sertaan segenap potensi

masyarakat dalam pelaksanaan usaha-usaha pembangunan dengan pengarahan yang bersifat mendidik dan mendorong melalui berbagai macam sarana dan kegiatan penerangan.

- 2). Dalam hubungan dengan kebijaksanaan ini, dilakukan usaha-usaha peningkatan dan pengarahan media penerangan yang ada dalam masyarakat, baik yang dikuasai oleh pemerintah maupun swasta, terutama bagi masyarakat di daerah pedesaan.
- 3). Perlu diusahakan pula adanya perpaduan yang saling mengisi antara berbagai usaha penerangan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penerangan dalam masyarakat, misalnya melalui Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS).
- 4). Diusahakan peningkatan dan pembinaan petugas penerangan, baik kuantitatif maupun kualitatif, dengan disertai penyediaan sarana yang cukup.

d. Agraria.

- 1). Pengaturan penggunaan tanah, air dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan tata-ruang, harus memperhatikan hakikat kebutuhan hidup manusia akan pangan, sandang, tempat permukiman dan segala prasarannya, sehingga tercipta suatu tata kehidupan dalam masyarakat, dimana penguasaan dan penggunaan tanah, air serta segala sesuatu yang terkandung didalamnya dapat diusahakan dan dimanfaatkan secara tepat bagi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat, dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam.
- 2). Diusahakan pengaturan dan penyusunan kembali penggunaan tanah dan air dalam rangka pengelolaan tata-ruang untuk kebutuhan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, perindustrian, perumahan dan sebagainya, yang mengarah kepada pemerataan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan sosial ekonomi antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, dengan memperhatikan sumber potensi yang dimiliki masing-masing wilayah yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan penelitian dan pengembangan hukum pertanahan.
- 3). Untuk dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam dari kerusakan dan kemusnahan yang disebabkan oleh alam maupun manusia dilaksanakan usaha-usaha rehabilitasi, restorasi, reservasi dan usaha-usaha lain, terutama bagi daerah-daerah kritis.

- 4). Disamping itu kerja sama antar instansi perlu ditingkatkan serta mekanisme dan pengawasannya perlu digerakkan, sehingga terdapat keselarasan dalam langkah dan kebijaksananya.
- 5). Dalam pada itu untuk memberikan keamanan dan jaminan hukum kepada masyarakat perlu dilanjutkan pelaksanaan landre form, pendaftaran tanah dan pengurusan hak-hak tanah, yang disertai dengan peningkatan dan penyempurnaan administrasinya.

#### **D. Pembiayaan Pembangunan Daerah.**

##### **1. Pengantar.**

Garis-garis Besar Haluan Negara menyebutkan, bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan Pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok Negara dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan diarahkan kepada pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan Pembangunan Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi. Sehubungan dengan itu maka untuk pembiayaan pembangunan di Daerah harus disediakan dana dalam jumlah yang memadai, yang penggunaannya ditujukan untuk mencapai sasaran pokok dan sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah, sehingga dapat menghasilkan pengaruh kumulatif dan berdaya guna serta berhasil guna secara maksimal.

##### **2. Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Daerah.**

Dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pembiayaan yang ada, baik secara kwalitatif maupun kwantitatif, dilaksanakan langkah kebijaksanaan sesuai dengan sifat masing-masing sumber pembiayaan, baik yang sepenuhnya dapat dikuasai oleh Daerah, maupun yang sebagian saja dikuasai, atau bahkan yang berada diluar kekuasaan Daerah.

- a. Sumber pembiayaan dari Pemerintah Pusat, baik melalui program dan proyek sektoral maupun melalui berbagai jenis program bantuan pembangunan (Inpres) pada dasarnya merupakan sumber pembiayaan yang berada diluar penguasaan Daerah.

Dalam hal ini kebijaksanaan peningkatan didaerah diarahkan kepada penyusunan usulan program/proyek yang lebih meyakinkan, ditinjau dari bentuk/isi program/proyek yang diusulkan dan yang dikaitkan dengan program Pembangunan Daerah dan Nasional secara keseluruhan. Disamping itu senantiasa diusahakan pening-

katan peranan Daerah dalam pengendalian program/proyek sektoral dengan sejauh mungkin mengusahakan, agar makin banyak program/proyek sektoral dimasukkan dalam program bantuan pembangunan daerah.

- b. Sumber pembiayaan dari Daerah sendiri pada dasarnya sepenuhnya dapat dikuasai oleh Daerah, sehingga kebijaksanaannya dalam hal ini diarahkan pada peningkatan kemampuan masing-masing sumber untuk menghasilkan dan sebaik-baiknya.
- 1). Kebijakan perpajakan dan penggalan sumber-sumber pendapatan di Daerah diarahkan kepada intensifikasi masing-masing jenis pungutan dan perluasan jenis pungutan pajak dan retribusi Daerah berdasarkan azas pemerataan beban dan progresivitas.
  - 2). Kebijakan mengenai Perusahaan Daerah dan Bank Pembangunan Daerah diarahkan kepada pemantapan kedudukan dan fungsinya dalam penyediaan dana untuk pembangunan.
  - 3). Kebijakan mengenai tabungan, baik tabungan Pemerintah Daerah maupun tabungan masyarakat, diarahkan kepada peningkatan tabungan tersebut melalui penyisihan sebagian dari pendapatan untuk investasi usaha-usaha yang produktif.

Diusahakan agar penerimaan anggaran yang berasal dari Daerah sendiri guna pembiayaan pembangunan tersebut setahap demi setahap dapat bertambah, sehingga ketergantungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat secara proporsional semakin berkurang. Demikian pula diusahakan peningkatan pembiayaan Anggaran Pembangunan, sehingga tercapai keseimbangan yang harmonis dengan Anggaran Rutin.

Dalam hal ini mekanisme pengeluaran pembiayaan untuk pelaksanaan proyek-proyek Pembangunan Daerah perlu ditingkatkan untuk memungkinkan pelaksanaan proyek tersebut tepat pada waktunya.

Kebijakan tentang Anggaran Daerah, baik mengenai Anggaran Rutin maupun Anggaran Pembangunan, yang pada hakekatnya kesemuanya merupakan pembiayaan Pembangunan Daerah perlu dibarengi dengan suatu sistem pengawasan yang berhasil guna terhadap keuangan maupun inventarisasi serta penggunaan benda-benda milik Pemerintah Daerah, yang sekaligus

menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan itu sendiri maupun memperlihatkan dengan jelas keserasian antara tahap pelaksanaan program atau proyek dan tahap-tahap pengeluaran pembiayaan yang dibutuhkan.

- c. Sumber pembiayaan sektor swasta yang berasal dari tabungan masyarakat dan penyediaan kredit perbankan yang pada dasarnya tidak dikuasai oleh Daerah diarahkan untuk membiayai sektor-sektor usaha yang mendapatkan prioritas, terutama yang bersifat cepat menghasilkan. Untuk itu peranan swasta dalam bidang usaha yang tidak/belum ditangani oleh pemerintah ditingkatkan, sehingga potensi permodalan yang ada dalam masyarakat dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dalam hal ini kebijaksananya diarahkan melalui pemantapan iklim usaha, sehingga dapat menarik penanaman modal yang sebanyak-banyaknya tanpa fasilitas PMA dan PMDN.

Disamping itu kebijaksanaan pemberian kredit untuk pengusaha-pengusaha golongan ekonomi lemah, termasuk petani dan nelayan, perlu diusahakan peningkatan volume dan kelebihannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada akhirnya akan tergantung pada pelaksana-pelaksananya, baik aparat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun usahawan swasta serta partisipasi aktif dari segenap lapisan masyarakat dalam menyambut tantangan pembangunan secara positif guna meratakan jalan bagi generasi yang akan datang untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.